

PENDIDIKAN PESANTREN DALAM PRESPEKTIF GENDER

Anik Faridah

anida_0630indo@yahoo.com

Abstrak: Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Muslim dan ikut terlibat langsung dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan pesantren dan gender adalah dua hal yang selalu menarik untuk diperbincangkan, sebab pengggagas pendidikan untuk perempuan adalah melalui didirikannya Madrasah diniyah yang diselenggarakan di lembaga pendidikan pesantren, sehingga kini, kita bisa melihat kiprah perempuan disegala sektor sekarang sudah mulai memiliki jabatan dan kedudukan, baik dalam ranah kultural maupun structural. Dalam arti, jika dahulu ada anggapan bahwa perempuan adalah orang kedua, maka sekarang anggapan tersebut sudah tidak relevan lagi. Namun jika kita telisik lagi, munculnya tokoh-tokoh perempuan di arena public bahkan hanya sering terdengar sebagai ikon persamaan kesempatan, dan bukan sebagai manifestasi yang konsisten dari kebijakan berbasis kesetaraan gender. Pada titik inilah “bias gender” dirasakan masih kental ditemukan dalam berbagai segmen kehidupan masyarakat.

Pada umumnya pergerakan perempuan itu muncul sebagai jawab atas respon terhadap permasalahan yang muncul. Pada masa awal abad XX hingga masa kemerdekaan; strategi yang ditempuh oleh gerakan perempuan adalah untuk meningkatkan kedudukan perempuan dan mencapai Indonesia merdeka.¹ Pasca kemerdekaan; keterlibatan dan eksistensi perempuan adalah selalu berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan bagi kemajuan kaum perempuan disegala aspek kehidupan, baik melalui pendidikan dan pengajaran di sekolah atau di pesantren maupun eksistensinya di dunia kerja dan politik.

¹ Samsul Nizar, *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 206-207.

Kata Kunci: *pesantren, pendidikan dan gender*

Abstract : Pesantren is a traditional Islamic educational institution that grows and develops in the midst of a Muslim community and is directly involved in efforts to educate the nation's life and has contributed significantly to the implementation of education in Indonesia.

Islamic boarding school education and gender are two things that are always interesting to discuss because the initiator of education for women is through the establishment of Madrasah Diniyah which is held in Pesantren education institutions. So, we can see the progress of women in all sectors now that they have started to have positions and positions, both in cultural and structural domains. In a sense, if in the past there was an assumption that women were the second person, now that assumption is no longer relevant. However, if we examine again, the emergence of female figures in the public arena is often heard only as an icon of equal opportunity, and not as a consistent manifestation of policies based on gender equality. It is at this point that "gender bias" is still strongly felt to be found in various segments of society's life.

In general, the women's movement emerged as a response to the problems that had arisen. In the early twentieth century until independence; the strategy adopted by the women's movement is to improve the position of women and achieve an independent Indonesia. Post-independence; The involvement and existence of women are always trying to improve welfare and empowerment for the advancement of women in all aspects of life, both through education and teaching at schools or in Islamic boarding schools as well as their existence in the world of work and politics.

Keywords: *Islamic boarding school, education and gender*

Pesantren dan Pendidikan

Sepanjang sejarah yang dilalui pesantren, tak dapat dipungkiri jika pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan adalah merupakan realitas dan fakta. Sumbangsih dan kontribusianya sangat besar dalam pendidikan umat islam secara khusus, dan masyarakat di negeri ini secara luas, di masa kini dan masa datang. Namun di zaman kontemporer ini, pesantren dan lembaga pendidikannya harus terus berinovasi dan memiliki langkah antisipatif pada setiap perubahan dan perkembangan zaman.

Secara historis, pesantren merupakan lembaga pendidi-

kan tertua di Jawa. Munculnya pesantren di Jawa bersamaan dengan kedatangan Walisongo yang menyebarkan Islam di daerah tersebut. Menurut catatan sejarah, tokoh yang pertama kali mendirikan pesantren adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim.²

Salah satu kelebihan dari model pendidikan yang dikembangkan para Wali sanga itu (dan kemudian menjadi ciri khas pendidikan pesantren) terletak pada pola pendekatannya yang didasarkan pada segala sesuatu yang sudah akrab dengan masyarakat dan perpaduan antara aspek teoritis dan praktis. Misalnya, Sunan Giri menggunakan metode pendekatan permainan untuk mengajarkan Islam kepada anak-anak, Sunan Kudus menggunakan dongeng, Sunan Kalijaga mengajarkan Islam melalui wayang kulit, dan Sunan Derajat mengenalkan Islam melalui keterlibatan langsung dalam rangka menangani kesengsaraan yang dialami masyarakat.³

Pola itu telah mengantarkan pesantren pada system pendidikan yang penuh kelenturan dan memiliki spectrum luas, melampaui batas-batas pesantren itu sendiri. Tidak berlebihan jika dikatakan, pesantren merupakan *deshooling society* dengan menjadikan masyarakat sebagai masyarakat pembelajar dan menjadikan belajar sebagai proses yang berjalan terus menerus. Masyarakat menjadi bebas dari sekolah sebagai institusi dengan aturan-aturannya, system evaluasinya, janji-janji kerjaan yang diberikannya, serta sertifikat yang dikeluarkannya.⁴ Pola ini, menjadikan pesantren tidak membuat batas yang tegas antara santri dan masyarakat yang ada disekitarnya. Demikian pula dengan waktu belajar, tidak ada batas dan sekat yang kaku sehingga proses pembelajaran dan pendidikan selama 24 jam hadir penuh dalam bentuk yang nyata.

Hal lain yang hingga kini masih dimiliki pesantren adalah penekanannya pada nilai-nilai yang dianutnya seperti kemandirian, kesederhanaan, dan keikhlasan. Nilai-nilai yang pada prinsipnya merupakan nilai-nilai keagamaan yang otentik. Disamping itu, dikalangan santri berkembang juga solidaritas yang cukup tinggi, toleransi dalam menjalankan tugas, dan rasa pengorbanan cukup besar bagi kepentingan umum. Kelebihan tersebut menjadikan pesantren memiliki potensi atau peluang cukup be-

² Abd. 'Ala, *Pembaruan Pesantren*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), 16-17.

³Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Dharma Bhakti, 1982), 22-24.

⁴Habib Chirzin, "Teguh pada Nilai Salaf dan Ahlussunnah wal Jama'ah" Rubrik Wawasan dalam Jurnal Pesantren, (N0. Perdana, Oktober-Desember, 1984), 39.

sar sebagai agen pembangunan,⁵ tanpa harus tergantung kepada teori developmentalisme yang kapitalistik. Hal ini menjadikan keberadaan pesantren sebagai lembaga dan system pendidikan alternatif.

Namun untuk menjadikan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang ideal, masih banyak ragam persoalan yang harus dituntaskan. Gempuran modernisasi dengan segala dampaknya adalah merupakan agenda terbesar yang butuh penyelesaian. Melalui kekayaan yang dimiliki pesantren, yakni tradisi (*turats* atau *al qadim al shalih*), warisan ini hendaknya dibaca kembali untuk menemukan nilai-nilai substansial yang menjadi inti dari keseluruhan tradisi tersebut, serta direkonstruksi untuk dikembangkan berdasarkan perubahan kehidupan kongkret yang mengitarinya.⁶

AlTurats sebagai landasan keilmuan pesantren hendaknya menjadi bingkai dalam merumuskan Islam pesantren dalam konteks kekinian. *Al qadim al shalih* berimplikasi terhadap perkembangan *al jaded al ashlah*. Kontekstualisasi nilai-nilai tradisi menjadi keniscayaan untuk dibumikan dalam realitas pendidikan pesantren dan menuntut kearifannya. Kesederhanaan, kemandirian, dan keikhlasan perlu dijadikan roh pendidikan dalam suatu rumusan kontekstual yang sesuai perkembangan dan perubahan kehidupan yang terus berjalan. Dengan demikian kesederhanaan akan menemukan titik labuhnya pada pengembangan efisiensi dan efektivitas lembaga, dan kemandirian akan diarahkan kepada pembentukan *civil society*, serta keikhlasan akan dikongkretkan kedalam bentuk pengembangan prestasi.⁷ melalui itu, pesantren dan masyarakat sekitarnya akan dapat mengetahui kebutuhannya secara riil serta akan selalu mengembangkan dirinya melalui upaya tak kenal lelah untuk mendapatkkan wawasan dan ilmu yang seluas luasnya.

Dalam prespektif itu, pendidikan (pengajaran inklusif) berbagai disiplin ilmu dan pengembangan metodologi yang lebih manusiawi dan religious akan menjadi kemestian yang tidak dapat diingkari untuk ditumbuhkembangkan. Oleh karena itu, pengembangan ilmu-ilmu yang bersifat umum tidak diletakkan sekedar sebagai pelengkap tanpa makna terhadap ilmu-ilmu syari'ah, atau menjadi sesuatu yang asing yang harus ditolak. Namun, akan diintegrasikan secara penuh dengan ilmu syari'ah sehingga kian mengokohkan keyakinan manusia

⁵Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, (Jakarta: Desantara, 2001), 133.

⁶ Abd 'Ala, *Pembararuan.*, 23.

⁷ Ibid, 24.

tentang realitas Tuhan sebagai sumber dan pencipta segala sesuatu.⁸

Aspek penumbuhan keyakinan tersebut diatas merupakan *the ultimate goal* yang perlu dicapai oleh pesantren. Sebab penilaian tentang keberhasilan pesantren sebagai pendidikan alternatif terletak, salah satunya, pada kemampuannya menyumbangkan pembangunan (mental) spiritual melalui pemberian ruang yang cukup untuk *emotionalization of religious feeling* yang diekspresikan secara intelektual.⁹ Selain itu, juga berbijak pada ketulusan pesantren untuk menyatu dengan masyarakat sekaligus sebagai agen transformasi yang dapat mencerahkan mereka. Sehingga, pesantren dengan seabreg nilai yang dipegangnya akan meraih keberhasilan dengan mengedepankan civility yang lambat laun tapi pasti akan berkembang pada masyarakat luas. Kesejahteraan, kedamaian, dan ketenangan masyarakat akan menjadi bagian yang begitu lekat dalam kehidupan. Jika demikian, maka lembaga pesantren dapat memberikan sumbangsiah nyata bagi perkembangan pendidikan alternative di Indonesia.

Konsep Gender

Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan gender dan mengapa dikaitkan dengan usaha emansipasi kaum perempuan?

Pertama, dalam kamus bahasa Inggris tidak dibedakan secara jelas istilah “sex and gender” keduanya diartikan sebagai jenis kelamin.¹⁰

Kedua, Gender adalah dimensi sosiokultural dan psikologis dari pria dan wanita. Istilah Gender dibedakan dari istilah jenis kelamin (seks). Seks berhubungan dari dimensi biologis dari pria dan wanita. Peran Gender (*gender role*) adalah ekspektasi social yang merumuskan bagaimana pria dan wanita seharusnya berpikir, merasa dan berbuat.¹¹

Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor-faktor social maupun

⁸ Ibid, 25.

⁹Zamakhsyari Dhafir, *Tradition and Change in Indonesian Islamic Education*, (Jakarta: Office of Religious Research dan development Ministry of Religious Affairs The Republik of Indonesia, 1995), 86.

¹⁰Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, (Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2008), 3.

¹¹ Jhon W. Santrock, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011), 194.

budaya, sehingga lahir beberapa anggapan tentang peran social dan budaya laki-laki dan perempuan. Bentuk social atas laki-laki dan perempuan itu antara lain; kalau perempuan dikenal sebagai makhluk yang lemah, lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa. Padahal sifat-sifat itu dapat dipertukarkan dan dapat berubah dari waktu ke waktu.¹²

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa gender dapat diartikan sebagai konsep social yang membedakan (dalam aarti: memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan adalah perbedaan secara kodrati, dimana laki-laki dikodratkan memiliki alat kelamin yang sifatnya memberi dan perempuan memiliki alat reproduksi yang sifatnya menerima, perempuan dengan alat reproduksinya dapat hamil, melahirkan, menyusui. Fungsi kodrati ini tidak dapat ditukarkan dengan laki-laki. Perbedaan secara kodrati inilah yang secara turun tenurun menjadikan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang berbeda dengan laki-laki. Semua hal itu juga berkaitan dengan factor social, geografis dan kebudayaan suatu masyarakat. Perempuan tersubordinasi oleh factor-faktor yang dikonstruksikan secara social. Banyak mitos dan kepercayaan yang menjadikan kedudukan perempuan berada lebih rendah daripada laki-laki. Hal itu semata-mata perempuan dipandang dari segi seks bukan dari segi kemampuan, kesempatan dan aspek-aspek manusiawi secara universal yaitu sebagai manusia yang berakal, bernalar dan berperasaan.¹³

Problematika Gender dan Pendidikan Pesantren

Paulo Freire mengecam pendidikan yang selama ini dianggap sebagai sumber kebajikan sebagai telah menjadi penindas yang ulung. Pendidikan yang pada umumnya dianggap memiliki misi umum untuk mencerdaskan bangsa ternyata malah berperan aktif mengkerdulkan anak didik, karena tidak mampu membuat mereka lebih humanis atau lebih manusia. Pendidikan yang selama ini dipercaya memiliki tugas untuk membukakan pikiran dan nurani manusia akan berbagai kesadaran palsu yang tumbuh dalam masyarakat jus-

¹²Trisakti Handayani dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, 5.

¹³Ibid.

tru turut serta menjadi pencipta kesadaran-kesadaran palsu sendiri dan menjadi pengekanng kebebasan, dengan cara-caranya yang terselubung. Menurut Freire:¹⁴ Pendidikan yang sungguh-sungguh membebaskan, takkan berjarak dari kaum tertindas, takkan memperlakukan mereka sebagai orang-orang yang tak beruntung, serta menyuguhi kaum tertindas itu model panutan dari antara kaum penindas. Pendidikan yang berawal dari kepentingan-kepentingan egoistis para penindas (egoisme yang berjubah kedermawanan palsu, yakni paternalisme), yang membuat kaum tertindas jadi objek-objek humanitarianisme, melestarikan dan memapankan penindasan. Pendidikan seperti itu adalah alat mendehumanisasi manusia.

Jika kita bersetuju dengan Freire, tentu kita akan dengan jeli mencermati kedudukan kita sebagai pendidik, untuk mempertanyakan apakah selama ini kita telah mampu membukakan mata anak didik kita terhadap berbagai kesadaran palsu, yang biasanya berjubah kedermawanan atau kemuliaan, atau kita, mungkin tanpa kita sadari, justru telah bersepakat dengan para penindas dan menjadi ujung tombak mereka dalam rangka melipur lara anak didik kita agar tidak merasa bahwa mereka telah menjadi objek penindasan.

Sebagai solusi pertimbangan dalam menyikapi problematika pendidikan terdapat tiga macam paradigma yang biasa mewarnai lembaga-lembaga pendidikan. Bagi mereka yang menganut paradigma konservatif, ketidaksetaraan merupakan hukum alam, dan oleh karenanya mustahil untuk dihindari, karena ia merupakan ketentuan sejarah atau bahkan takdir Tuhan. Perubahan sosial bukan sesuatu yang perlu diperjuangkan dengan serius, karena dikhawatirkan justru akan membawa manusia kepada kesengsaraan baru. Bagi penganut paradigma ini, menjadi miskin, tertindas, terpenjara adalah buah dari kesalahan mereka sendiri, karena kelalaian atau kemalasan mereka untuk belajar dan bekerja keras. Jika mereka mau keadaan dapat berbalik bagi mereka. Kaum konservatif beranggapan bahwa harmoni dalam masyarakat merupakan hal yang penting agar konflik dapat dihindari.

Paradigma liberal menganggap bahwa persoalan ekonomi dan politik tidak berkaitan langsung dengan pendidikan. Oleh karenanya usaha-usaha pemecahan persoalan pendidikan yang dilakukan pada umumnya berupa usaha-usaha reformasi yang bersifat kosmetik sep-

¹⁴Paulo Freire, dkk. *Menggugat Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 444.

erti pembangunan kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah, pengadaan laboratorium atau komputer dsb. yang secara umum terisolasi dari sistem dan struktur ketidakadilan kelas, gender, dominasi budaya dan represi politik yang ada dalam masyarakat. Pendidikan justeru berfungsi untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, menjadi media untuk mensosialisasikan dan memproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi dengan baik. Paradigma ini pada umumnya berupaya membangun kesadaran naif, di mana pendidikan tidak berusaha mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada dianggap sudah baik atau *given* dan oleh karenanya tidak perlu dipertanyakan¹⁵. Paradigma yang ketiga adalah paradigma kritis, yang memandang pendidikan sebagai arena perjuangan politik. Pendidikan dengan paradigma ini mengagendakan perubahan struktur secara fundamental dalam politik ekonomi masyarakat di mana ia berada. Bagi mereka, kelas dan diskriminasi gender dalam masyarakat tercermin pula dalam dunia pendidikan. Dalam perspektif ini urusan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap *the dominant ideology*, ke arah transformasi sosial. Tugas utama pendidik, dengan demikian adalah menciptakan ruang agar sikap kritis terhadap sistem dan struktur ketidakadilan, serta melakukan dekonstruksi dan advokasi menuju sistem sosial yang lebih adil. Paradigma kritis ini sekaligus mengadopsi kesadaran kritis dengan cara melatih anak didik untuk mampu mengidentifikasi segala bentuk ketiadilan yang mengejawantah dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian melakukan analisis bagaimana sistem dan struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya.¹⁶

Membangun Pendidikan Berperspektif Gender di Pesantren

Jika pesantren memilih jalan untuk tidak sekadar menjadi pengawet atau penyangga nilai-nilai, tetapi penyeru pikiran-pikiran yang produktif dengan berkolaborasi dengan kebutuhan jaman, maka menjadi salah satu tugas pesantren untuk tidak membiarkan berlangsungnya ketidakadilan gender yang selama ini terbungkus rapi dalam kesadaran-kesadaran palsu yang berkembang dalam masyarakat. Sebaliknya ia harus bersikap kritis dan mengajak masyarakat pesantren dan masyarakat di sekitarnya untuk mengubah/membongkar kepalsuan-kepalsuan tersebut sekaligus mentrans-

¹⁵ William O'Neil, dalam Fakhri, *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2001) 42.

¹⁶ *Ibid*, 48.

formasikannya menjadi praktik-praktik yang lebih berpihak kepada keadilan sesama, terutama keadilan bagi kaum perempuan.

Sehingga, untuk melakukan perubahan dalam suatu institusi pendidikan sebesar pesantren, kita tidak bisa melangkah berdasarkan asumsi-asumsi belaka, tetapi seyogyanya berdasarkan data-data yang lebih konkrit yang didapat dari pengamatan, penelitian dan analisis kritis terhadap lembaga pesantren. Data-data inilah yang kemudian akan dijadikan patokan untuk melangkah dan mengambil keputusan-keputusan strategis dalam melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Pengamatan itu hendaknya diarahkan pada elemen-elemen yang biasanya tergenderkan dalam sebuah organisasi atau lembaga,¹⁷ seperti misalnya: ideologi-ideologi dan tujuan-tujuannya, sistem nilai yang dikembangkannya, struktur-struktur yang dibangun, gaya manajemennya, pembagian tugas/pekerjaan, pengaturan/tata ruang kantornya, ungkapan-ungkapan, hubungan kekuasaan, lambang-lambang yang digunakan dsb. yang semua itu dapat memberi sinyal sejauh mana lembaga pesantren tergenderkan. Keputusan berikutnya akan banyak berawal dari data-data mengenai hal-hal tersebut di atas, tetapi beberapa hal berikut ini dapat dijadikan bahan pertimbangan:

Perluakah pelatihan/pengajaran khusus? Pendidikan kesadaran gender memang tidak harus *decreet*, atau terpilah dari pembelajaran yang lain, tapi ia juga tidak bisa diperlakukan sebagai sampiran belaka. Pendidikan gender yang hanya disampirkan pada pembelajaran-pembelajaran yang ada biasanya bersifat longgar dan mudah kehilangan arah. Kecuali itu karena miskin kontrol maka sangat mudah melemah, atau bahkan menghilang. Dengan memperlakukan pendidikan gender sebagai program yang khusus dan sekaligus menyebar atau terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain, ia akan memiliki tanggung jawab dan kontrol yang lebih besar. Perlu ada tagihan-tagihan terhadap materi apa dan bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga dapat dimunculkan evaluasi dan perbaikan-perbaikan secara terus menerus, hingga perspektif gender menjadi budaya masyarakat tersebut.

Dalam prespektif pesantren, Kyai/Nyai/Ustadz dan terutama lagi ustadzah mesti menjadi pilar utama gender *mainstreaming*, karena gender merupakan ideologi yang sangat tampak pada perilaku dan perbuatan sehari-hari. Pada masyarakat pesantren yang pada umumnya

¹⁷Mandy Macdonald, dkk. *Gender dan Perubahan Organisasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 97.

masih menganut budaya paternalistik, contoh perilaku berkeadilan gender menjadi sangat penting. Sementara, seperti yang dikemukakan Tholkhah,¹⁸ bahwa salah satu kelemahan pesantren (tradisional) adalah aspek kepemimpinan yang sentralistik dan hirarkhis yang berpusat pada kiai, yang menjadikannya (pesantren) laksana ‘kerajaan kecil’ di mana kiai merupakan sumber mutlak yang memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam kehidupan dan lingkungan pesantren, termasuk terhadap ilmu yang diajarkan kepada para santrinya. Dalam kondisi demikian, maka harus diupayakan Kyai/Ibu Nyai mendapatkan akses terhadap dasar-dasar pengetahuan dan pendidikan gender terlebih dahulu, untuk membukakan pikiran dan nurani akan adanya persoalan tersebut. Karena persoalan gender merupakan persoalan budaya, maka ‘pendidikan’ gender kepada Kyai/Ibu Nyai ini mungkin tidak dapat dilaksanakan secara konfrontatif dalam jangka waktu yang pendek. Hal ini pun dapat terkendala, seperti yang dikemukakan Nurcholis Madjid, manakala sang kiai memiliki ketetapan yang sangat kuat untuk tidak mengubah pesantrennya untuk mengikuti perkembangan zaman, yang pada umumnya terjadi pada kiai-kiai yang sesungguhnya tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti perkembangan ilmu.¹⁹ Setelah kiai, maka ustadz dan ustadzah menjadi sasaran kedua agenda membangun pendidikan berperspektif gender ini. Jika kyai, nyai, ustadz dan ustadzah sudah mendapatkan akses yang cukup terhadap pengetahuan gender, maka komitmen yang sangat penting untuk dijadikan landasan membangun pendidikan gender akan jauh lebih mudah dicapai.

Adapun metode pembelajaran di pesantren, seperti diketahui metode pembelajaran yang pada umumnya dilakukan oleh pesantren adalah metode pembelajaran yang lebih menekankan transmisi keilmuan klasik, yang memungkinkan adanya penerimaan ilmu secara bulat (*taken for granted*) yang tak terbantahkan, yang memberi ruang gerak yang sempit bagi adanya dialog dan diskusi kritis. Sementara itu, persoalan gender sarat dengan probematik-problematik kultural yang sulit diselesaikan tanpa adanya dialog dan diskusi-diskusi. Metode pembelajaran ini, jika diterapkan apa adanya, jelas tidak akan membuahkan hasil yang baik. Oleh sebab itu harus diupayakan kesempatan untuk terjadinya dialog dan diskusi-diskusi, agar konsep-konsep penting pendidikan gender dapat lebih mudah terserap oleh para santri.

¹⁸Imam Tholkhah, dkk. *Membuka Jendela Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 83.

¹⁹ Ibid, 84.

Karena kurikulum pesantren pada umumnya sudah mapan, misalnya dijadikannya kitab kuning (yang menurut beberapa penelitian justru mengandung problematika-problematika gender) sebagai materi pokok pembelajaran, maka harus ada terobosan-terobosan dalam penyampaiannya. Seperti yang dikemukakan Arkoun dalam Tholkhah, bahwa suatu kelemahan yang melingkupi akal para pengkaji kitab kuning adalah masalah logosentrisme, yang menganggap teks-teks keagamaan yang sebenarnya bersifat immanen dianggap transenden ilahiah. Kitab fiqh, oleh sebagian pengkaji kitab kuning dianggap sebagai hukum Tuhan yang tak boleh dikritisi sehingga keberadaannya menjadi sakral dan absolut, padahal sebenarnya ia tak lebih dari produk pemikiran ulama yang relatif terbatas. Tanpa keterbukaan atau sikap yang mengakomodasi adanya penafsiran-penafsiran baru yang bersifat sosio historis kritis, niscaya pendidikan gender juga tidak mungkin terwujud dalam kondisi seperti itu. Pendidikan gender yang tumbuh dalam mazhab pemikiran poststrukturalis tidak bisa terlaksana tanpa adanya keterbukaan dan dialog dengan ilmu-ilmu lain secara interdisipliner.

Perlu dicatat bahwa pendidikan gender tidak serta merta mengharuskan ketersediaan materi ajar yang mutlak tidak bisa gender, karena kecuali sulit diwujudkan juga tidak mendorong tumbuh kembangnya pemikiran-pemikiran kritis yang justeru alan menjadi tulang punggung kehidupan berkeadilan gender. Dari teks-teks atau contoh-contoh aktivitas yang bias gender yang ada di sekitar pesantren, santri justeru bisa diajak untuk meresapi konsep gender lewat contoh-contoh yang konkrit.

DAFTAR PUSTAKA

‘Ala, Abdul, *Pembaruan Pesantren*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.

Chirzin, Habib. “*Teguh pada Nilai Salaf dan Ahlussunnah wal Jama’ah*” Rubrik Wawasan dalam Jurnal Pesantren, N0. Perdana, Oktober-Desember, 1984.

Dhafir, Zamakhsyari *Tradition and Change in Indonesian Islamic Education*, Jakarta: Office of Religious Research dan development Ministry of Religious Affairs The Republik of

- Indonesia, 1995.
- Handayani, Trisakti dan Sugiarti, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Freire, Paulo dkk. *Menggugat Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Marwan Saridjo, *Sejarah Pondok Pesantren di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Dharma Bhakti, 1982.
- Macdonald, Mandy dkk. *Gender dan Perubahan Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Santrock, Jhon W. *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Samsul Nizar, *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam di Nusantara*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Tholkhah, Imam dkk. *Membuka Jendela Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wahid, Abdurrahman, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan*, Jakarta: Desantara, 2001.